



Pasar Amerta Gunung Sari

Alih Fungsi Kios Jadi Tempat Kos

Dewan Minta Satpol PP

Lakukan Penertiban

Bangli (Bali Post) -

Dewan menyayangkan adanya alih fungsi beberapa kios di Pasar Amerta Gunung Sari di Desa Yangapi, Tembuku menjadi tempat kos. Terkait hal itu dewan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera melakukan langkah penataan termasuk melakukan pembinaan terhadap kepala pasar setempat.

Wakil Ketua DPRD Komang Carles, Jumat (8/5) kemarin mengungkapkan dirinya cukup prihatin dengan kondisi sejumlah pasar di Bangli. Menurutnya, hampir semua pasar tradisional milik pemerintah yang ada empat kecamatan bermasalah. Hal ini dipicu oleh kurang tegasnya sikap pemerintah dalam menyikapi setiap persoalan yang

ada.

Carles mengatakan, agar semua persoalan pasar termasuk di Pasar Amerta Gunung Sari Yangapi bisa segera selesai, pemerintah harus melakukan langkah tegas. Bila perlu Pemkab Bangli menurunkan Satpol PP untuk menertibkan adanya tindakan pedagang yang tidak sesuai aturan. "Untuk yang di

Pasar Yangapi, bila perlu turunkan Satpol PP untuk meng-gusur duktang yang ada di sana. Karena kios itu ditempati tidak sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.

Selain langkah tegas tersebut dewan juga meminta Disperindag untuk melakukan pembinaan terhadap kepala pasar. Namun bila upaya pem-

binaan gagal dilakukan, Disperindag agar tidak segan-segan mencopot kepala pasar. Dengan dilakukannya langkah seperti itu, maka dirinya yakin persoalan pasar bisa diselesaikan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, adanya alih fungsi sejumlah kios di Pasar Amerta Gunung Sari, Desa Yangapi Tembuku menjadi tempat kos ternyata tidak pernah diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Nengah Sudibya. Saat dikonfirmasi Kamis (7/5),

pejabat asal Desa Penglipuran itu mengaku tidak pernah mendapat laporan dari kepala pasar bahwa sejumlah kios di pasar tersebut telah dijadikan tempat hunian oleh beberapa warga.

Namun demikian, pihaknya berjanji akan segera mengecek keberadaan sejumlah kios yang beralih fungsi menjadi tempat kos itu. Bahkan Sudibya mengaku akan melakukan peng-gusuran jika memang benar ditemukan adanya warga yang menempati kios tidak sesuai peruntukannya. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 9 Mei 2015

Hal : 18



Berawal dari Penolakan Setor Rp 60 Juta

KASUS dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan belakangan terakhir memang menjadi perhatian publik. Apalagi belum lama ini pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan menetapkan dua tersangka, mereka adalah mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP Tabanan berinisial JG, dan Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP berinisial CD.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari pengakuan salah satu staf DKP yang dimintai uang sekitar 60 juta jika ingin mendapatkan SK CPNS-nya. Padahal untuk mendapatkan SK yang merupakan hak para pegawai itu tidak seharusnya membayar. Kasus inilah yang kemudian diusut tuntas baik oleh pihak kejaksaan maupun kepolisian. Sebagai pegawai golongan I dengan gaji Rp 1,8 juta per bulan, pegawai tersebut mengaku jika uang Rp 60 juta itu sangatlah besar dan tidak mungkin dimilikinya. Apalagi,

ia telah mengabdikan dari tahun 2002 silam bertugas menjadi sopir di bagian IPL – pengolahan limbah. Ia pun sempat berdebat karena tidak terima disuruh membayar Rp 60 juta. "Saya hanya ingin mendapatkan hak saya," jelasnya waktu itu.

Mencuatnya kasus ini juga mendapat respons dari Komisi I DPRD Tabanan. Beberapa hari setelah muncul di sejumlah media, DPRD langsung memanggil petinggi DKP dan Kepala BKD Tabanan untuk dimintai klarifikasi. Bahkan, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengambil langkah untuk memberikan sanksi administratif bagi oknum bersangkutan berupa mutasi. Upaya ini diakui Eka untuk bisa meng-clear-kan permasalahan tersebut. Sejumlah petinggi DKP pun dimutasi ke sejumlah SKPD, termasuk oknum yang gencar disebut-sebut sebagai pelaku pemerasan. Terlepas dari itu Bupati Eka juga menginstruksikan Inspektorat un-

tuk melakukan investigasi.

Di sisi lain, aparat penegak hukum baik itu Polres maupun Kajari Tabanan pun terkesan sangat hati-hati menangani kasus ini. Kasus kisruh CPNS di lingkungan DKP Tabanan dipilah menjadi dua. Pertama, dugaan pemerasan yang ditangani oleh Kejari Tabanan, dan dugaan adanya pegawai selundupan yang ditangani Polres Tabanan.

Baik Kejari maupun Polres Tabanan tampaknya tak mau berlama-lama untuk bisa mengungkap kasus tersebut. Satu per satu staf DKP dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, dari berjalannya waktu, pihak kejaksaan akhirnya memiliki cukup saksi dan bukti kuat hingga akhirnya berani menetapkan dua orang yang dianggap kuat sebagai yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.

Kejari Tabanan Atang Bawono mengatakan, penanganan perkara dugaan pemerasan di DKP diawali dengan mem-

Edisi : Sabtu, 9 Mei 2015

Hal : 19



Sambungan

bentuk tim sejak Maret 2015. Tim inilah yang kemudian bekerja keras mengumpulkan alat bukti mulai dari petunjuk, surat, hingga keterangan saksi. "Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang ada JG mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP dan CD Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP kita naikkan statusnya menjadi tersangka, setelah sebelumnya juga diperiksa sebagai saksi," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga akan terus menyempurnakan penyidikan, jika nanti dalam perkembangannya ada alat bukti lain. Pasalnya, bukan tidak mungkin pihaknya akan menetapkan tersangka lain.

Anggota DPRD Tabanan I Gusti Ngurah Sanjaya dari Fraksi Nasdem sangat mengapresiasi kinerja Kejari dalam upaya mengusut tuntas kasus CPNS tersebut. Menurutnya, jika memang sudah memiliki saksi dan bukti kuat terhadap kasus tersebut, proses hukum

dapat ditindaklanjuti sampai tuntas. "Ini agar tidak jadi bulan-bulanan informasi," ucapnya.

Anggota dewan asal Senggan, Penebel ini mengakui jika dirinya sangat menghormati proses hukum. "Aparat yang lebih tahu, jika memang sudah ada bukti dan saksi kuat kami tentu dukung agar segera dituntaskan," katanya.

Menurutnya kasus yang terjadi di lingkungan DKP Tabanan ini sebagai pembela-jaran bagi masyarakat maupun aparaturnya. Jika memang ingin membawa Tabanan ke arah yang lebih baik lagi ke depan setidaknya mulai perbaiki kualitas dan profesionalisme SDM di dalamnya. "Jangan terus bergulir isu jadi pegawai kontrak pakai uang. Masyarakat juga jangan semena-mena menggunakan sumber dana hanya untuk SK. Karena ini akan membuka kesempatan bagi oknum aparaturnya untuk mencari keuntungan," ucapnya. **(bit)**

Edisi : Sabtu, 9 Mei 2015

Hal : 19



FM 96.5 **Warung Global**
Bongkar Penyimpangan

Pembagian PHR Badung

SANTERNYA pemberitaan terkait dugaan penyimpangan pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung ke kabupaten/kota se-Bali, disikapi Kejaksaan Tinggi Bali, sehingga anggota DPRD Badung I Nyoman Sentana yang memunculkan informasi tersebut di media, langsung dipanggil pihak Kejati Bali. Kawan *Global* pada acara *Warung Global Interaktif* yang disiarkan Radio *Global* berharap jangan sampai pembagian PHR ini disalahgunakan. Jika memang dipakai untuk kepentingan pengembangan pariwisata memang harus untuk itu. Pada acara yang juga dipancarluaskan Radio *Singaraja FM*, *Swara Negara* dan Radio *SwiB Amlapura* ini penegak hukum harus berani membongkar penyimpangan pembagian PHR Badung ini.

Menurut Gung Derah di Denpasar jangan sampai pembagian peruntukkan PHR ini disalahgunakan. PHR mestinya untuk kepentingan pengembangan pariwisata.

Kepada siapa lagi rakyat harus percaya, untuk itu pihak kejaksaan jangan main-main menangani kasus ini. Jangan pandang bulu siapa yang terlibat harus tegas.

Semua proses harus mengikuti prosedur hukum. Menurut Jony di Payangan jika anggota dewan yang memegang kartu as ini harus betul-betul terbuka dan jujur memberikan informasi. Ia juga sepakat dengan pengopini sebelumnya agar PHR bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukkan.

Sembari mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Badung karena sudah mensubsidi kabupaten lain, Werdha di Gianyar juga berharap proses hukum jalan terus. PHR memang harus sesuai peruntukannya. Siapa yang menyelewengkan PHR ini? Jangan sampai Kejati dan Kejari beraninya sama "barang bekas" artinya berani sama pejabat yang sudah lengser.

Badung sebagai tetangga yang baik, menurut Arya di Denpasar juga setuju jika PHR memang harus sesuai dengan peruntukannya. Terkadang niat baik orang memberikan bantuan tak dihargai. Di Tabanan jalan banyak rusak, jalan adalah penunjang pariwisata. Ia setuju penyimpangan ini diusut tuntas. Ia juga sepaham jika pembagian PHR ini untuk Tabanan dan Bangli dihentikan saja seperti yang diusulkan anggota dewan di Badung. Ia juga menyarankan KPK turun tangan. Salah satu masyarakat Tabanan, Fera menyampaikan usulan yang sama. Dibawa ke manakah Pembagian PHR dari Badung itu? Usut biar tuntas. (sikha)



Dukung Revitalisasi Teluk Benoa

Bendesa Adat Diam-diam

Bersurat ke Jokowi

Denpasar (Bali Post) -

Masifnya penolakan rencana reklamasinya Teluk Benoa oleh sekaa teruna-teruni, organisasi kepemudaan, pengusaha *water sport* dan LSM di Bali, rupanya "dilawan" secara diam-diam oleh beberapa komponen masyarakat. Mereka itu sejumlah bendesa adat,

forum, LSM dan pengurus koperasi, serentak mengirim surat ke Presiden Jokowi mendukung revitalisasi. Mereka kompak bersurat ke Presiden pascadrummer Superman Is Dead (SID) Jerinx bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jerinx salah satunya menyampaikan

penolakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Dari data yang disampaikan sumber *Bali Post*, Jumat (8/5) kemarin, sedikitnya 30 surat pernyataan sikap mendukung reklamasi/revitalisasi Teluk Benoa yang dikirim ke Presiden Joko Widodo. Masing-masing,

22 surat dibuat oleh forum/lembaga/koperasi/perwakilan masyarakat, 5 surat dibuat oleh bendesa adat di Kuta Selatan, dan 3 surat dibuat oleh mantan bendesa yang juga dari Kuta Selatan.

Hal. 27
Secara Pribadi

Secara Pribadi

Dari Hal. 1

Lima surat yang dibuat bendesa memakai kop resmi desa masing-masing. Namun, isi surat lebih menyiratkan kepada dukungan secara pribadi, yang dibuat seolah-olah mewakili masyarakat desa masing-masing. Sementara tiga surat dari mantan bendesa tidak disertai kop resmi. Namun dalam suratnya seolah-olah masih menjabat bendesa adat.

Seperti salah satu mantan bendesa di Kuta Selatan mencantumkan jabatan sebagai bendesa periode 2006-2009, 2009-2012, dan 2012-2015. Padahal, dia sudah digantikan secara resmi oleh bendesa baru sejak hari raya Galungan, Desember 2014.

Surat-surat dari bendesa dan mantan bendesa ini ditandatangani antara tanggal 10 dan

11 April 2015. Bahkan, ketiga mantan bendesa kompak membuat dan menandatangani surat pada tanggal 11 April 2015. Sementara surat-surat pernyataan sikap yang dibuat oleh forum/lembaga/koperasi/perwakilan sebagian masyarakat rata-rata dibuat pada akhir bulan Maret atau awal bulan April 2015.

Dari sejumlah surat yang dikirim kepada Presiden terdapat kemiripan redaksionalnya. Dalam surat dukungan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa terdapat lampiran yang bertuliskan "Dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dan tidak bisa diwakili oleh keputusan apa pun selain diri sendiri. Setiap warga negara mempunyai hak bebas berpendapat tanpa tekanan."

Sementara dalam surat bendesa adat juga terdapat kesamaan redaksional utamanya

dalam alasan mendukung revitalisasi Teluk Benoa. Dalam surat itu tertulis: "Bahwa dalam rangka rencana pelaksanaan revitalisasi Teluk Benoa oleh PTTWBI kami pada prinsipnya memberi dukungan, adapun yang mendasari yakni Teluk Benoa selama ini terus mengalami pendangkalan yang berdampak akan tersumbatnya alur sungai yang menuju teluk, keindahan Teluk Benoa akibat tersedimentasi menjadi hilang, jika direvitalisasi maka terdapat daerah wisata baru yang sangat menjanjikan untuk kemajuan Bali. Apabila revitalisasi dilakukan kami berharap pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan konsep pembangunan Bali yakni mengikuti konsep Tri Hita Karana. Demikian pernyataan ini kami buat tanpa ada tekanan dari pihak manapun." (kmb32)

Edisi : Sabtu, 9 Mei 2015

Hal : 1 dan 27